
ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA KINERJA ANGGARAN REALISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

Efi Susanti¹

¹ Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau

Ikhsan Abdul Rahman²

² Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau

E-mail: ikhsanabdulrahman2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis melalui prinsip *value for money*. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dan 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 perhitungan ekonomis dengan nilai rasio sebesar 97,12% dikategorikan ekonomis, perhitungan efisiensi dengan nilai rasio sebesar 102,79% dikatakan efisien, dan perhitungan efektivitas dengan nilai rasio sebesar 106,76% dikategorikan efektivitas. Pada tahun 2021 perhitungan ekonomis dengan nilai rasio sebesar 88,91% dikategorikan ekonomis, perhitungan efisiensi dengan nilai rasio sebesar 110,67% dikategorikan efisien, dan perhitungan efektivitas dengan nilai rasio sebesar 99,14% dikategorikan tidak efektivitas. Dengan demikian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 dan 2021 yang ditinjau dari elemen ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) belum memenuhi prinsip *value for money*.

Kata kunci: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, *value for money*, kinerja

Abstract

This study aims to analyze the performance accountability of the Bengkalis District Social Service through the principle of value for money. The type of research used is qualitative. Data collection techniques used are documentation and interviews. The data obtained are in the form of Performance Reports of Government Agencies of the Bengkalis Regency Social Service in 2020 and 2021. The results of this study indicate that in 2020 the economic calculation with a ratio value of 97.12% is categorized as economic, the efficiency calculation with a ratio value of 102.79% is said to be efficient, and the calculation of effectiveness with a ratio value of 106.76% is categorized as effectiveness. In 2021 economic calculations with a ratio value of 88.91% are categorized as economical, efficiency calculations with a ratio value of 110.67% are categorized as efficient, and effectiveness calculations with a ratio value of 99.14% are categorized as ineffective. Thus, the performance of the Bengkalis District Social Service in 2020 and 2021 in terms of economic, efficiency, and effectiveness (3E) elements has not met the value for money principle.

Keywords: *economical, efficiency, and effectiveness, value for money, performance*

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik yaitu salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum berupa pelayanan baik itu dalam bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, jasa pelayanan publik, keamanan, kepastian hukum dan lain sebagainya. Pemerintah ditingkat daerah memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat dalam kualitas jasa yang menjadi pusat layanan bagi

masyarakat. Perubahan ruang lingkup daerah yang terus berlangsung sangat cepat mengharuskan setiap organisasi untuk dapat dengan cepat dan tepat beradaptasi dengan perubahan secara cerdas menerapkan berbagai metode pengolahan organisasi sesuai dengan pengolahan sumber – sumber ekonomis erat kaitannya dengan pengolahan keuangan, yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan (Rahman, 2021).

Kinerja instansi pemerintah saat ini juga menjadi pusat perhatian dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggara administrasi publik. Masyarakat terkadang menilai organisasi sektor publik sebagai sarang pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Masyarakat kini semakin cerdas dan kritis untuk menuntut melakukan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga – lembaga sektor publik. Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang tersebut telah dibelanjakan, melainkan kemampuan dalam menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisiensi dan efektif (Basri, 2018).

Value for money merupakan konsep pengukuran kinerja yang berdasarkan pada elemen ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Halim & Kusufi, 2018). Organisasi sektor publik harus memperhatikan *Value For Money* dalam menjalankan aktivitasnya, tuntutan ini sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengolahan keuangan negara dan daerah harus dikelola secara ekonomis, efisiensi dan efektif serta harus bertanggung jawab dengan asas keadilan. Dengan adanya *value for money* diharapkan organisasi atau instansi pemerintah dapat mengevaluasi kinerja serta dapat meminimalisir pemborosan dan sumber kebocoran dana, karena *value for money* dapat memberikan informasi apakah anggaran yang digunakan atau yang telah dibelanjakan menghasilkan nilai (*value*) bagi masyarakatnya (Hatta, 2021).

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintahan dalam bidang sosial dibawah Bupati, fokus dari masalahnya didominasi oleh bantuan terhadap masyarakat sesuai aturan pemerintah pusat. Proses dalam penyaluran ini memerlukan penganggaran dana yang akuntabel dan transparan karena kinerjanya menjadi pusat perhatian bagi masyarakat. Dalam memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi, yang diperlukan adalah analisis menyeluruh atas kinerja yang telah dilakukan Dinas Sosial dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran (Fitriah, 2021).

Salah satu instansi pemerintah adalah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Setiap tahunnya Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis membuat program dan kegiatan. Menurut laporan alokasi dan realisasi anggaran instansi pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis periode 2020 dan 2021, realisasi pengeluaran keuangan untuk masing – masing yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis selama ini lebih kecil dari pada target yang dianggarkan.

Berdasarkan laporan alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2020 program yang mencapai realisasi anggaran tertinggi adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 99,95%. Sedangkan program dengan capaian realisasi terendah yaitu Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (EKS, Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya) sebesar 69,69%. Laporan alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2021 program yang mencapai realisasi anggaran tertinggi adalah Program Pengolahan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sebesar 98,02%. Sedangkan program dengan capaian realisasi terendah yaitu Program Rehabilitasi Sosial sebesar 58,44%.

Selain itu masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam program tahun 2020 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 97,98% dengan kegiatan pengendalian penanganan kesejahteraan sosial terhadap fakir miskin dan warga KAT (Komunitas Adat Terpencil). Tahun 2021 Program Pemberdayaan Sosial sebesar 95,95% dengan kegiatan pengendalian penanganan kesejahteraan sosial dan peran aktif PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial). Dilihat dari pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pencapaiannya diatas 90% yang artinya kegiatan yang dilakukan telah terlaksana dengan baik. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bagian Pelayanan Masyarakat/tempat pengaduan masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis diketahui masih banyak masyarakat atau PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) mengeluhkan terkait penyaluran bantuan – bantuan sosial yang dinilai tidak adil dimana sebagian masyarakat belum mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka dapatkan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan). Hal ini juga didukung dari berita hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menemukan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Dinas Sosial tahun anggaran 2020 yang mana seharusnya dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19 (www.antaraneews.com, 2020). Dilihat dari beberapa masalah yang telah dikemukakan diatas perlu sekiranya pengukuran kinerja anggaran realisasi untuk melihat apakah pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan konsep *value for money* yaitu ekonomis, efektif dan efisien. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Tujuan penelitian untuk mengukur kinerja Anggaran Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 dan 2021 dengan menggunakan konsep *value for money* yang dilihat dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah kondisi atau gambaran yang berhubungan dengan tingkat tercapainya suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi sektor publik yang tertuang dalam perumusan skema – skema *strategic planning*, secara umum kinerja adalah suatu gambaran keberhasilan organisasi sektor publik dalam mencapai tujuannya dalam periode tertentu (Mahsun, 2013).

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu teknik evaluasi dalam kemajuan pekerjaan yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Dwinanda, 2018). Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Manfaat Pengukuran Kinerja Anggaran Realisasi

Pengukuran kinerja Anggaran Realisasi sangat penting dalam menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Pengukuran kinerja

anggaran realisasi yang handal juga merupakan salah satu kunci kesuksesan organisasi. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja dapat memotivasi manajer dan karyawan untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan (Indriyawati, 2020).

Manfaat dari penilaian kinerja anggaran realisasi menurut Efriyanti (2012) ada 5 yaitu:

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijakan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi.

Aspek Pengukuran Kinerja Anggaran Realisasi

Ada 6 (enam) aspek dalam pengukuran kinerja anggaran realisasi menurut Rempowatu & Tirayoh, (2016) yaitu:

1. Kelompok masukan (*input*) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses (*process*) merupakan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketetapan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran (*output*) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak terwujud (*intangible*).
4. Kelompok hasil (*outcome*) merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat (*benefit*) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan negatif.
6. Kelompok dampak (*impact*) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Organisasi sektor publik bisa tidak lepas dari pemerintahan maka organisasi sektor publik identik dengan pemerintah (Basri, 2018).

Maka dapat disimpulkan bahwa organisasi sektor publik merupakan organisasi pelayanan publik yang mana dapat melayani kepentingan umum dengan cakupan masyarakat luas. Organisasi sektor publik pastinya selalu berkaitan dengan pemerintah.

Indikator Value For Money

Value for money merupakan metode yang fungsinya untuk menilai atau mengukur sebuah organisasi, instansi, atau perusahaan sudah mengelola kinerja keuangan dengan baik sesuai dengan tiga elemen dalam *value for money* yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas.

1. Ekonomis
Mardiasmo (2018) Ekonomi merupakan hubungan antara pasar dan *input* dimana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terbaik yang dimungkinkan. Kriteria ekonomis menurut Mardiasmo (2018):
 - a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka ekonomis atau sangat ekonomis.

- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka ekonomis berimbang atau cukup ekonomis.
 - c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka tidak ekonomis.
2. Efisiensi
- Mardiasmo (2018) Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Kriteria efisiensi adalah:
- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efisien.
 - b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efisien berimbang atau cukup efisien.
 - c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efisien atau sangat efisien.
3. Efektivitas
- Mardiasmo (2018) Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria efektivitas adalah:
- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efektif.
 - b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efektif berimbang atau cukup efektif.
 - c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efektif atau sangat efektif.

Hipotesis

Berdasarkan telaah pustaka diatas, maka peneliti dapat menarik hipotesis yaitu: Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis belum memenuhi prinsip *value for money*.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) “kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelum memiliki masalah, atau keinginan yang jelas tetapi dapat langsung memasuki objek yang masih bersifat umum dan hasil akhir dari kualitatif akan menghasilkan informasi – informasi yang bermakna dan bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif sehingga hipotesis atau ilmu yang dapat digunakan untuk membantu dalam mengatasi masalah.

Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data kemudian dianalisis berdasarkan teori – teori yang relevan dengan permasalahan dalam pengambilan kesimpulan dan saran. Penelitian ini dilakukan karena bermaksud untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kerjanya dengan baik atau tidak berdasarkan anggaran realisasi yang dilihat dari perhitungan pengukuran *value for money* yaitu dengan menggunakan elemen ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Data primer didalam penelitian ini ialah data yang berkaitan langsung dengan permasalahan didalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2020 dan 2021. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu mengacu kepada informasi yang dikumpulkan dari sumber – sumber yang sudah ada. Data sekunder pada penelitian ini ialah berupa jurnal, literatur, skripsi, serta buku terdahulu yang berkaitan dengan penelitian analisis *Value For Money* pada pengukuran kinerja sektor publik sebagai penunjang pada penelitian ini.

Teknik Analisa

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif. Penelitian akan melakukan pengukuran kinerja anggaran realisasi melalui pengukuran *value for money* dengan melihat 3 elemen, yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Dari pengukuran elemen ini, kemudian peneliti akan menjelaskan hasil perhitungan tersebut untuk melihat apakah kinerja anggaran realisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sudah baik atau belum. Data – data untuk menghitung ketiga elemen ini didapatkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2020 dan 2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ekonomis

Pada tahun 2020 perhitungan ekonomis pada seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 97,12% dan pada tahun 2021 hasil perhitungan ekonomis adalah 88,91. Berdasarkan kriteria penilaian ekonomis yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dinyatakan ekonomis dan tahun 2021 program atau kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis juga dinyatakan ekonomis. Hasil perhitungan rasio ekonomis menunjukkan pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8,21%. Meskipun terjadi penurunan namun jika dilihat dari segi ekonomis hal ini berarti bahwa pada tahun 2021 telah terjadi penghematan anggaran sebesar 8,21%.

Suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan akan dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan asumsi jika realisasi anggaran untuk tiap pelaksanaan program atau kegiatan yang dijabarkan oleh suatu instansi pemerintah lebih besar dari pada anggaran yang telah ditetapkan maka rasio ekonomis akan semakin besar dan begitu juga sebaliknya.

Dalam perhitungan ekonomis ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dan 2021 adalah baik karena telah sesuai dengan konsep ekonomis yaitu penghematan anggaran dalam melaksanakan program atau kegiatan suatu organisasi ataupun instansi. Persentase ekonomis dibawah 100% berarti Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan dana kurang dari anggaran yang telah ditetapkan.

Efisiensi

Pada tahun 2020 perhitungan efisiensi pada seluruh program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 102,79%. Berdasarkan kriteria penilaian efisiensi yang telah ditetapkan maka pada tahun 2020 program atau kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dinyatakan efisien. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2021 dengan perhitungan efisiensi pada seluruh program/kegiatan yang dilakukan adalah sebesar 110,67% sehingga dapat dikategorikan efisiensi menurut kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa dari tahun 2020 ke tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan sebesar 7,88% hal ini berarti bahwa pada tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mampu menghemat dana untuk mendapatkan output yang maksimal.

Suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan akan dikatakan efisien apabila output yang dihasilkan lebih besar dari penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya. Dengan asumsi apabila realisasi fisik yang telah dicapai oleh suatu instansi lebih besar dari pada realisasi keuangan yang ditetapkan maka rasio efisiensi yang dihasilkan akan semakin besar.

Dalam perhitungan efisiensi pada tahun 2020 dan 2021 kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah baik karena telah memenuhi konsep efisien yaitu menghasilkan output yang maksimal dengan input yang lebih rendah. Persentase efisiensi lebih dari 100% menunjukkan bahwa persentase fisik program/kegiatan yang telah dilaksanakan melebihi persentase keuangan yang dikeluarkan untuk pelaksanaannya.

Efektivitas

Pada tahun 2020 perhitungan efektivitas pada seluruh program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 106,76%. Berdasarkan kriteria penilaian efektivitas yang telah ditetapkan maka pada tahun 2020 program atau kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dinyatakan efektif. Namun yang terjadi pada tahun 2021 dimana perhitungan rasio efektivitas adalah sebesar 99,14% dengan kriteria penilaian dinyatakan tidak efektif. Hasil perhitungan rasio efektivitas ini menunjukkan bahwa tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7,62% yang berarti bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan kinerja dalam mencapai target sasaran yang telah ditentukan.

Suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan akan dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut telah mencapai tujuan dari sasaran akhir yang ditetapkan. Dengan asumsi bila capaian kinerja yang dicapai lebih besar dari yang ditargetkan maka rasio efektivitas yang dihasilkan juga akan semakin besar dan begitu juga sebaliknya.

Dalam perhitungan efektivitas pada tahun 2020 kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah baik dan 2021 kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tidak baik, karena pada tahun 2020 telah mencapai target atas program/kegiatan yang dilaksanakan namun pada tahun 2021 mengalami penurunan dimana belum memenuhi kategori efektivitas yaitu pencapaian target atas program/kegiatan yang dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ini merupakan organisasi sektor publik yang memiliki tujuan untuk memberikan bantuan - bantuan kepada masyarakat, maka dari itu untuk menilai suatu efektivitas perlu dilihat apakah bantuan - bantuan tersebut sudah dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian efektivitas dibawah 100% menunjukkan bahwa realisasi hasil/keluaran yang dilakukan tidak mencapai ekspektasi hasil/keluaran yang diharapkan oleh instansi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara kepada bagian Pelayanan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan berita yang ditemukan terhadap Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis diketahui masih banyak masyarakat yang mengeluh akibat belum mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka dapatkan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan). Hal ini didukung dari berita hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menemukan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2020 yang mana seharusnya dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Dapat dilihat dari perhitungan ketiga elemen *value for money* diatas bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 telah memenuhi prinsip *value for money* dan 2021 belum memenuhi prinsip *value for money*.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada tahun 2020 berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dikategorikan ekonomis dengan persentase 97,12% dan tahun 2021 berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dikategorikan ekonomis dengan persentase sebesar 88,91%.

Pada tahun 2020 berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dikategorikan efisien dengan persentase 102,79% dan tahun 2021 berdasarkan program/kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dikategorikan efisien dengan persentase sebesar 110,67%.

Pada tahun 2020 berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dikategorikan efektif dengan persentase 106,76% dan tahun 2021 berdasarkan program/kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dikategorikan tidak efektif dengan persentase sebesar 99,14%.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat mengevaluasi kembali program dan kegiatannya agar dapat memenuhi elemen *value for money* sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Yesti Mutia. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Pekanbaru: Jurusan Akuntansi FE UR 2017.
- Dwinanda, Y. (2018, Mei). Analisis *Value For Money* dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Yogyakarta.
- Efriyanti, F., Anggraini, R., & Fiscal, Y. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Dasar Investor Dalam Menanamkan Modal Pada PT. Bukit Asam, TBK. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 3(2), 299-316.
- Fitriah, Nur Khalifah (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Menggunakan Konsep *Value For Money*. Makasar.
- Hatta, Z., E. A (2021). Analisis *Value For Money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau. *Journal Economics, Accounting and Business*. Vol. 1 No. 1, September, 198-211.
- Indriyawati, M (2020). Analisis Kinerja Berbasis *Balanced Scorecard* Pada Koperasi Simpan Pinjam Titian Umat Sejahtera. Semarang.
- Mahsun, Muhamad (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik, edisi terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meitri, I. A., & Susanti, E. (2022). Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten kampar. *The Lancet*, 320(8304), 922.
- Penerbit: Alfabeta.
- Rahman, W. A (2021). Analisis *Value For Money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Riau
- Rempowatu, J., & Tirayoh, V. (2016, Maret). Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011-2014. *Jurnal EMBA*, 4(1), 982-989.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. edisi ke 6.
- www.antaranews.com. (2020). *Berita Dinas Sosial*. Retrieved from antaranews: <http://www.antaranews.com/berita/2328558/ditemukan-bpk-ada-11-pns-di-bengkalis-riau-terima-bst-covid-19>.
- Pemerintah Indonesia 2003. Undang – Undang No.17 Tahun 2003 Yang Mengatur Tentang Keuangan Negara.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Yang Mengatur Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah.